



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DALAM RANGKA PERSIAPAN DAN KESIAPAN PELAKSANAAN
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
TANGGAL 21-23 NOVEMBER 2019**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Pelaksanaan kunjungan kerja didasarkan pada hasil rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, serta Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI.

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berjumlah 10 (sepuluh) orang Anggota, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, **Saan Mustopa (F-Nasdem)**.

Nama-nama anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalteng selengkapnya adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| 1. Saan Mustopa | : | Ketua Tim (Wakil Ketua Kom II DPR RI)/ F-Nasdem |
| 2. H. Yaqut Cholil Qoumas, Lc | : | Anggota (Wakil Ketua Komisi II DPR RI)/F-PKB |
| 3. Ir. Endro Suswanto Yahman, M.Sc | : | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 4. Drs. Djarot Syaiful Hidayat, MS | : | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 5. Paryono, SH, MH | : | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 6. Ir. Arsyadjudiandi Rachman, MBA | : | Anggota/F-PG |
| 7. Drs. Supriyanto | : | Anggota/F-Gerindra |
| 8. Kristiana Muki, S.Pd.,M.Si | : | Anggota/F-Nasdem |
| 9. Sukamto, SH | : | Anggota/F-PKB |
| 10. Mohamad Muraz, SH, MM | : | Anggota/F-PD |

Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh Kasubag TU Komisi II DPR RI (Mahmud), Staf Sekretariat Komisi II DPR RI (Sugiaman, Hisyam Wildani, dan Aniyah), dan Tenaga Ahli Komisi II DPR-RI (Satya Alvino Pinandito Bya), serta wartawan dari Bagian Pemberitaan DPR RI (Singgih Kinanti Rimbani) dan wartawan TV Parlemen (Ade Ardiansyah).

B. RUANG LINGKUP

Pada kunjungan kerja ke Provinsi Kalteng ini, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan Gubernur Kalteng beserta para pejabat Pemerintah Provinsi Kalteng, KPU Provinsi Kalteng, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, Bawaslu Provinsi Kalteng, dan dihadiri pula oleh jajaran Forkopimda Provinsi Kalteng.

Topik yang menjadi fokus perhatian Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah terkait dengan persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 dimana di Provinsi Kalteng akan terdapat 2 Pilkada yaitu Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Seluruh data, informasi, maupun masukan yang diperoleh dari kunjungan kerja ini akan menjadi catatan penting bagi Komisi II DPR RI untuk nantinya ditindaklanjuti pada rapat-rapat dengan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI serta dengan pihak-pihak terkait lainnya.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. PAPARAN PEMERINTAH PROVINSI KALTENG

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

- NPHD untuk Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2020 telah ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp249.796.238.000,- yang akan dikucurkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap 1 sebesar Rp12.500.000.000,- (telah ditransfer tanggal 11 November 2019).
 - Tahap 2 sebesar Rp94.918.495.200,- (akan dikucurkan pada minggu pertama bulan Februari 2020).
 - Tahap 3 sebesar Rp142.377.742.800,- (akan dikucurkan pada minggu pertama bulan Juni 2020).
- NPHD untuk KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah ditandatangani pada tanggal 30 September 2019 dengan nilai sebesar Rp35.530.000.000,- dan pencairannya akan dibagi dalam 4 (empat) tahap yaitu :
 - Tahap 1 sebesar Rp265.000.000,- (telah ditransfer ke rekening KPU Kabupaten Kotawaringin Timur)
 - Tahap 2 sebesar Rp14.106.000.000,- (akan ditransfer paling lambat 14 hari setelah penandatanganan dokumen pelaksanaan anggaran 2020).
 - Tahap 3 sebesar Rp17.632.000.000,- (akan ditransfer paling lambat 4 bulan sebelum hari pemungutan suara).
 - Tahap 4 sebesar Rp3.526.500.000,- (akan ditransfer paling lambat 1 bulan sebelum hari pemungutan suara).
- Pemprov Kalteng juga telah menyepakati sekaligus menandatangani anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020 kepada Bawaslu yang nilainya sebesar lebih kurang Rp90 milyar, Polda Kalteng sebesar Rp40 milyar, dan Koren 102 Panju Panjung sebesar Rp2,5milyar.
- Selain berupa anggaran, bentuk dukungan lain yang diberikan oleh Pemprov Kalteng untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah :

- Menginstruksikan pembentukan desk pilkada beserta penganggarannya melalui SE Gub Kalteng No.100/224/II.1/Pem Tanggal 11 Oktober 2019.
- Pelaksanaan pemantauan, monitoring, dan evaluasi setiap situasi yang berkembang terkait kesiapan pelaksanaan pada setiap tahapan.
- Turut aktif dalam upaya mensosialisasikan pilkada tahun 2020, sekaligus proaktif dalam memberikan endidikan politik kepada masyarakat.
- Berupaya menolak berbagai upaya penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, isu SARA, dan tindakan lain yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan kelancaran pilkada, dengan mendayagunakan secara optimal peran teknologi informasi dan forum-forum binaan pemerintah, serta melalui kerjasama dengan berbagai ormas maupun partai politik.

2. Potensi Kerawanan

- Kondisi geografis Provinsi Kalteng yang luas, dengan persebaran penduduk yang masih banyak berada di daerah pedalaman.
- Tingginya mobilitas penduduk dan penduduk musiman (alasan pekerjaan, dll).
- Data penduduk yang masih belum valid dan akurat.
- Kondisi infrastruktur di beberapa wilayah masih belum memadai (sebagian hanya dapat dijangkau melalui aliran sungai).
- Kondisi Kalteng yang rawan bencana (banjir dan kabut asap), terlebih lagi pada bulan September 2020 nanti Provinsi Kalteng diperkirakan akan mengalami musim kemarau panjang.
- Isu SARA yang berkembang di masyarakat.
- Netralitas ASN.

Khusus terkait dengan netralitas ASN ini, Pemprov Kalteng melakukan upaya strategis antara lain dengan cara sbb :

- Bersama Bawaslu dan pihak terkait melakukan pemetaan potensi konflik serta langkah-langkah untuk mengatasinya;
- melakukan kajian dan analisis untuk memenuhi kebutuhan publik dan stakeholder terkait akan informasi yang valid dan akurat;
- Melakukan koordinasi dengan Forkopimda, dengan tetap berpedoman pada penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang dikeluarkan oleh Mendagri dan Kapolri.

3. Progres Program KTP-el

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Provinsi kalteng per 30 Juni 2019, jumlah penduduk Kalimantan Tengah adalah sebanyak 2,577.215 jiwa dengan jumlah wajib KTP adalah 1.802.383 jiwa. Kondisi terakhir untuk perekaman KTP-el adalah sebanyak 1.708.852 atau 94,81%. Untuk memaksimalkan perekaman dan pencetakan KTP-el dilakukan pula sistem jemput bola dimana petugas yang akan mendatangi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang dihadapi terkait dengan upaya mengoptimalkan pelaksanaan program ini, yaitu minimnya jumlah blangko KTP-el yang dialokasikan oleh Pusat, serta kondisi alat rekam yang sudah usang dan sebagian tidak bisa digunakan lagi.

4. Permasalahan dan Masukan dari Pemprov Kalteng

- Besarnya anggaran yang harus dialokasikan untuk pelaksanaan Pilkada di Provinsi Kalteng cukup memberatkan Pemprov Kalteng karena mencapai 23% dari PAD Provinsi Kalteng, untuk itu perlu kiranya ada bantuan pula dari pemerintah pusat tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.
- Masih ada hal-hal yang belum satu pemahaman terkait penanganan pelanggaran antara Bawaslu dengan pihak kepolisian/kejaksaan.
- Perlu kiranya dipertimbangkan agar ketentuan mengenai kewajiban mundur bagi anggota ASN/TNI/Polri yang ikut maju dalam Pilkada dirubah menjadi cuti.
- Perlu adanya jaminan bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas, bias berupa asuransi maupun bentuk jaminan lainnya.
- Anggaran yang dialokasikan untuk TNI (Korem 102) mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan anggaran pada saat Pemilu serentak 2019, namun pihak Pemprov Kalteng telah menyetujui untuk menambahkan jumlah anggaran tersebut pada saat pembahasan anggaran berikutnya.
- Pemprov Kalteng dan pemkab Kotawaringin Timur bersama-sama pihak kepolisian dan KPU akan terus melakukan koordinasi terkait titik-titik krusial yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan tahapan pilkada, terutama keamanan dan pergerakan surat suara dan kotak suara.
- Pihak Kejaksaan sudah menyiapkan personil yang akan ditempatkan di Sentra Gakkumdu.

5. Catatan dari Anggota Komisi II DPR RI

- Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 harus menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.
- Pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu harus mengantisipasi hilangnya hak pilih karena tidak memiliki KTP-el, serta mengantisipasi penggunaan KTP-el palsu.
- Pemerintah daerah harus memiliki cyber-troops yang berfungsi untuk meng-counter berita-berita hoaks yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan kelancaran pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.

B. PAPARAN KPU PROVINSI KALTENG & KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. Persiapan Pembentukan Penyelenggara Adhoc

Terkait dengan persiapan pembentukan penyelenggara adhoc, KPU Provinsi Kalteng akan memberikan pembekalan kepada 14 KPU Kab/Kota se-Kalimantan Tengah agar pelaksanaan perekrutan yang akan dimulai pada bulan Januari 2020 dapat berlangsung dengan lancar. Adapun jadwal pembentukan badan penyelenggara adhoc adalah sbb :

- PPK (1 Januari 2020 s/d 21 Februari 2020)
- PPS (21 Februari 2020 s/d 21 Maret 2020)
- PPDP (Maret 2020)
- KPPS (21 Juni 2020 s/d 21 Agustus 2020).

2. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi Kalteng akan dilakukan secara masif agar masyarakat luas dapat memahami akan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di wilayah Provinsi Kalteng, serta dapat meningkatkan jumlah partisipasi pemilih sesuai dengan target nasional, yaitu minimal 77,5 %. Adapun bentuk sosialisasi yang akan dilakukan adalah sbb :

- Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2020, dengan mengundang 1.000 peserta.
- KPU Kab. Kotawaringin Timur akan melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan berbagai segmen masyarakat, serta dengan membentuk Relasi (Relawan Demokrasi) yang nantinya akan membantu KPU Kab. Kotawaringin Timur dalam pelaksanaan sosialisasi hingga ke tingkat desa.
- Informasi melalui media cetak maupun elektronik/website.
- Pemasangan baliho, spanduk, umbul-umbul, dan bentuk promosi lainnya hingga ke tingkat desa/kelurahan.
- Kerjasama dengan unsur pemerintah, tokoh masyarakat/agama/pemuda dan mahasiswa dalam pelaksanaan sosialisasi.
- Melaksanakan kegiatan seni dan budaya terkait dengan pilkada serentak 2020.

3. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

- Untuk saat ini, yang telah dilakukan dalam proses Pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan adalah proses penginputan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
- Untuk memastikan pemilih pemula terdata dalam daftar pemilih, KPU Provinsi Kalteng telah bekerjasama dengan Dinas Dukcapil Provinsi Kalteng untuk mendata pemilih pemula yang sudah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, untuk dilakukan perekaman KTP-el dan diberikan KTP-el pada saat hari pemungutan suara.
- Kendala yang dihadapi dalam proses pemutakhiran data adalah masih ditemukan adanya data ganda antar kabupaten dan antar kecamatan, serta masih tersendatnya proses perekaman KTP-el.

4. Permasalahan dan Masukan dari KPU Provinsi Kalteng

- Aturan atau regulasi dari KPU RI sangat mepet waktunya turun ke daerah, yakni mendekati berlangsungnya tahapan atau saat tahapan sudah berlangsung, sehingga KPU di daerah sering kesulitan dalam mensosialisasikan dan merencanakan tahapan yang akan dilaksanakan.
- Regulasi terkait rekrutmen badan penyelenggara adhoc perlu disederhanakan, terutama tentang batas usia dan batas periode, karena menyulitkan KPU untuk mendapatkan petugas yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan sebagai penyelenggara adhoc.
- Honorarium penyelenggara badan adhoc tidak sebanding dengan beban tugas, dan terkait besarnya honorarium tersebut, akan sangat membantu apabila pihak pemerintah daerah dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor S-735/MK.02/2018 tanggal 7 Oktober 2019 terkait

penyesuaian jumlah honorarium badan penyelenggara adhoc Pilkada Serentak tahun 2020.

- Keterbatasan anggaran yang tersedia akan berdampak terhadap kurang maksimalnya bimbingan teknis kepada badan penyelenggara adhoc.

5. Catatan dari Anggota Komisi II DPR RI

- Pihak penyelenggara harus sedini mungkin sudah mengantisipasi kebutuhan anggaran apabila terjadi pemilihan ulang, serta dalam rangka mengantisipasi kekurangan surat suara.
- Para penyelenggara pemilu harus memikirkan langkah-langkah pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya mobilisasi pemilih dari luar daerah.
- Pendidikan terhadap pemilih harus lebih gencar dilakukan agar tingkat partisipasi pemilih akan lebih meningkat dibandingkan pelaksanaan pemilu/pilkada yang pernah dilaksanakan.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Secara umum persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak di wilayah Provinsi Kalteng berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan, dan NPHD juga telah ditandatangani sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Namun demikian, KPU RI dalam menurunkan aturan ke daerah harus lebih memperhatikan waktu dan kegiatan yang dimiliki oleh KPU di daerah dalam rangka menerapkan serta menindaklanjuti aturan-aturan tersebut.
2. Perlu dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian peraturan terkait persyaratan sebagai anggota badan penyelenggara adhoc, yaitu pada daerah-daerah tertentu yang kesulitan untuk merekrut petugas penyelenggara adhoc yang memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan, terutama terkait batas usia dan batas periode.
3. Penyesuaian jumlah honorarium badan penyelenggara adhoc sebagai tindak lanjut dari PMK Nomor S-735/MK.02/2018 harus sedapat mungkin bisa direalisasikan karena akan berpengaruh terhadap motivasi kerja para penyelenggara.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja yang dapat kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra terkait dalam rapat-rapat yang akan diadakan oleh Komisi II DPR RI. Komisi II DPR RI juga telah meminta kepada pihak terkait agar segala permasalahan maupun usulan dapat pula disampaikan secara tertulis kepada Komisi II DPR RI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2019

**Ketua Tim
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI**

**Saan Mustopa, M.Si
A-367**

